

IMPLEMENTASI PROGRAM SMART KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA JAJAG KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI

Implementation of the Smart Village Program to Improve the Quality of Population Administration Services in Jajag Village Banyuwangi Regency

Dody Wisnu Sampurna^{1*}

¹Universitas Negeri Surabaya

*corresponding author:
dodywisnu.20011@mhs.unesa.ac.id

Kata Kunci:
Implementasi
Kebijakan
Administrasi kependudukan

Keywords:
Implementation
Policy
Population administration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Smart Kampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Desa Jajag, Kabupaten Banyuwangi. Program Smart Kampung merupakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat desa. Dalam implementasi kebijakan program smart kampung untuk meningkatkan kualitas pelayanan, masih terdapat banyak masyarakat yang belum memahami adanya program smart kampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini mengacu pada teori George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Smart Kampung di Desa Jajag telah berjalan dengan baik dalam meningkatkan kecepatan serta kemudahan pelayanan administrasi kependudukan. Tetapi masih terdapat permasalahan pada aspek komunikasi yang masih belum merata. Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi metode interaktif secara rutin.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Smart Village Program policy in improving the quality of population administration services in Jajag Village, Banyuwangi Regency. The Smart Village Program is an information technology-based public service innovation developed by the Banyuwangi Regency Government to realize effective, efficient, transparent, and accountable services at the village level. In the implementation of the Smart Village program policy to improve service quality, many people still do not understand the existence of the Smart Village program. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The analysis of policy implementation in this study refers to the theory of George C. Edwards III which includes aspects of communication, resources, disposition of implementers, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the Smart Village Program in Jajag Village has been running quite well in improving the speed and ease of population administration services. However, there are still problems in the communication aspect which is still uneven. The village government is advised to increase the intensity of socialization of interactive methods on a regular basis.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <http://assyifa.forindpress.com/index.php/jadment/index>

Submit: 18-03-2026

Accepted: 30-03-2026

Published: 02-04-2026

PENDAHULUAN

Reformasi administrasi publik di Indonesia mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance*. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

menjadi dasar penting dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas layanan pemerintah. Pelayanan publik tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga kemudahan akses, transparansi, dan keadilan bagi masyarakat (Budiasa, 2021).

Perkembangan teknologi informasi turut mendorong transformasi digital dalam sektor pemerintahan. Konsep *e-government* hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi kependudukan menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat (Bimantoro et al., 2021). Pelayanan administrasi yang sebelumnya bersifat manual kini beralih ke sistem digital untuk mempercepat proses dan meminimalkan kesalahan.

Salah satu inovasi pemerintah daerah adalah Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. Program ini merupakan adaptasi dari konsep *smart city* yang disesuaikan dengan kondisi desa. Smart Kampung bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, termasuk pelayanan administrasi kependudukan (Setiawan, 2022). Program ini juga didukung oleh Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaannya.

Meskipun demikian, implementasi program ini masih menghadapi kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan digital. Hal ini menyebabkan masyarakat masih menggunakan metode konvensional dalam mengurus administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara inovasi teknologi dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsinya (Mahsyar, 2011).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Smart Kampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Desa Jajag Kabupaten Banyuwangi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Nugroho, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk

memahami fenomena implementasi kebijakan secara mendalam dalam konteks alami (Denzin & Lincoln, 2017). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna dan pengalaman dari subjek penelitian secara komprehensif. Lokasi penelitian berada di Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi didasarkan pada implementasi aktif Program Smart Kampung di desa tersebut. Subjek penelitian terdiri dari perangkat Desa Jajag dan masyarakat yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan meliputi kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat sebagai pengguna layanan yang bertotal 5 orang dengan pengambilan hasil wawancara pada bulan Januari 2026

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014).

Fokus penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang terdiri dari empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini digunakan untuk menilai efektivitas implementasi Program Smart Kampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

HASIL

Program Smart Kampung Banyuwangi merupakan inisiatif pionir yang bermula dari optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015, dengan fokus membangun infrastruktur serat optik di tingkat desa untuk akses internet merata. Program ini secara resmi diluncurkan pada Mei 2016 oleh Menteri Kominfo Rudiantara melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016, yang mengintegrasikan pelayanan publik di 327 desa/kelurahan melalui portal

smartkampung.id, menjadikan Banyuwangi sebagai percontohan nasional *smart city*.

Pada 2017, program diperkuat dengan Perbup Nomor 60 Tahun 2017 tentang Masterplan Smart City melalui Smart Kampung, memperluas cakupan ke ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan, seni budaya, serta pengentasan kemiskinan, dengan pendekatan inklusif berbasis masyarakat. Hingga kini, inisiatif ini terus berkembang, diakui melalui Innovative Government Award 2022 dan dipaparkan di ASEAN Smart City Network 2023, berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi terendah di Jawa Timur (7,5% pada 2022).

Program Smart Kampung di Desa Jajag adalah bagian dari kebijakan Kabupaten Banyuwangi untuk mendekatkan pelayanan publik hingga tingkat desa melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Melalui portal dan aplikasi Smart Kampung, warga Jajag dapat mengurus layanan administrasi kependudukan, surat keterangan desa, serta berbagai perizinan secara online, tanpa harus datang berulang kali ke kantor desa, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Di Desa Jajag, Smart Kampung tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga dikaitkan dengan program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan seperti program “Kanggo Riko (Untuk Anda)” yang memberi dukungan modal dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar mandiri secara ekonomi. Kerangka Smart Kampung di Banyuwangi termasuk di Jajag yang memadukan jaringan serat optik desa, pengembangan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta basis data warga miskin yang terintegrasi dalam sistem sehingga bantuan sosial dan program pemberdayaan dapat lebih tepat sasaran.

Implementasi program Smart Kampung Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di analisis menggunakan teori George C. Edwards III memiliki beberapa indikator yang meliputi

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Menurut Teori Edward III Komunikasi adalah penyampaian pesan dari pemberi pesan melalui saluran dan tujuan tertentu. Penyampaian pesan yang jelas dimaksudkan untuk tidak terjadi kesalahpahaman tentang substansi kebijakan tersebut yang pada akhirnya terjadi kesalahan interpretasi tentang hal tersebut. Informasi kebijakan selayaknya harus disampaikan secara tepat, jelas, dan konsisten kepada para pelaksana. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, pelaksana akan memungkinkan untuk tidak memahami atau salah dalam mengartikan tujuan kebijakan. Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas dan efektif kepada semua pihak yang terlibat. Tujuan, sasaran, standar dasar perlu disampaikan agar tidak terjadi distorsi interpretasi (Nugroho,2009).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi komunikasi dalam Program Smart Kampung di Desa Jajag telah dilakukan melalui berbagai saluran formal maupun informal, seperti rapat desa, pengumuman di balai desa, penyampaian informasi melalui perangkat RT/RW, rapat dusun, hingga pemanfaatan grup WhatsApp. Meskipun demikian, efektivitas komunikasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan pemahaman antara pemerintah desa, pelaksana di tingkat dusun, dan masyarakat. Tujuan dan manfaat program memang telah disampaikan, tetapi prosedur teknis dinilai masih sulit dipahami sebagian warga, terutama mereka yang memiliki tingkat literasi digital rendah.

Selain itu, frekuensi sosialisasi formal yang terbatas, kurangnya pelatihan teknis yang berkelanjutan, serta ketidakkonsistenan alur informasi dari tingkat desa ke dusun menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi dan kebingungan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, komunikasi kebijakan dalam Program Smart Kampung di Desa Jajag masih memerlukan penguatan melalui peningkatan intensitas sosialisasi, penyederhanaan materi, serta penyampaian informasi yang lebih konsisten dan mudah dipahami untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan secara menyeluruh di tingkat masyarakat.

Sumber Daya

Dalam indikator ini penulis menjelaskan mengenai pemahaman terkait sumber daya merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Adanya sumber daya yang cukup meliputi manusia (SDM), anggaran, infrastruktur, dan teknologi sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan Program Smart Kampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, kepala dusun, dan masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa indikator sumber daya dalam pelaksanaan Program Smart Kampung di Desa Jajag menunjukkan kondisi yang relatif memadai pada tingkat desa, namun masih terbatas dan belum merata pada tingkat dusun. Dari aspek sumber daya manusia, jumlah staf pada tingkat desa dinilai cukup, tetapi tingginya beban kerja, ketidakhadiran petugas secara konsisten, serta kemampuan teknologi informasi yang belum merata menyebabkan pelaksanaan pelayanan belum sepenuhnya efektif. Pada tingkat dusun, jumlah staf

dan kompetensi teknis jauh lebih terbatas sehingga ketergantungan pada satu atau dua orang yang memahami teknologi menjadi sangat tinggi. Dari aspek sarana dan prasarana, kantor desa telah memiliki perangkat komputer, jaringan internet, dan akses sistem Smart Kampung yang cukup memadai, meskipun stabilitas jaringan serta keterbatasan perangkat cadangan masih menjadi hambatan. Sebaliknya, pada tingkat dusun, fasilitas teknologi hampir tidak tersedia, dan pelaksana masih mengandalkan perangkat pribadi serta harus datang ke kantor desa untuk memperoleh akses terhadap sistem. Pelatihan bagi para pelaksana memang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten dan dilanjutkan oleh pemerintah desa, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin, belum menjangkau seluruh pelaksana, dan belum memberikan peningkatan kemampuan yang merata. Dari aspek pendanaan, dukungan anggaran dari pemerintah desa dan program pemerintah kabupaten telah tersedia untuk kebutuhan dasar, tetapi masih belum mencukupi untuk pemeliharaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengadaan sarana pendukung khususnya pada tingkat dusun. Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan kompetensi teknologi, minimnya sarana dan prasarana di tingkat dusun, serta dukungan anggaran yang belum optimal merupakan tantangan utama dalam pemenuhan indikator sumber daya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana teknologi yang memadai, dan penguatan dukungan anggaran diperlukan agar implementasi Program Smart Kampung dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Desa Jajag.

Disposisi Pelaksana

Dalam indikator ini penulis menjelaskan bahwa disposisi pelaksana merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi mencakup sikap, komitmen, motivasi, rasa memiliki, dedikasi, serta respons pelaksana dalam menghadapi hambatan. Sikap dan komitmen yang kuat akan mempengaruhi cara pelaksana menjalankan tugas, sedangkan rasa memiliki terhadap program dapat mendorong tanggung jawab yang lebih besar dalam mencapai tujuan kebijakan.

Penulis menyimpulkan bahwa disposisi pelaksana Program Smart Kampung di Desa Jajag secara umum berada dalam kategori cukup baik, terutama pada tingkat desa yang menunjukkan sikap mendukung, komitmen tinggi, rasa tanggung jawab yang kuat, dan tingkat dedikasi yang positif meskipun dihadapkan pada keterbatasan. Namun, disposisi pelaksana di tingkat dusun belum merata, ditandai dengan rendahnya rasa memiliki terhadap program, tidak adanya insentif khusus yang dapat meningkatkan motivasi, serta keterbatasan fasilitas yang memengaruhi dedikasi pelaksana. Dalam menghadapi hambatan, pelaksana cenderung melakukan konsultasi dengan perangkat desa atau menunda pelayanan, sehingga menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas adaptif dan kemampuan teknis. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan motivasi, penyediaan insentif, pelatihan yang lebih intensif, serta penguatan rasa kepemilikan program agar implementasi Program Smart Kampung dapat terlaksana dengan lebih efektif dan berkelanjutan pada seluruh tingkatan wilayah.

Struktur Birokrasi

Dalam indikator ini penulis menjelaskan bahwa struktur birokrasi merupakan salah satu elemen fundamental yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi mengacu pada bagaimana tugas, kewenangan, prosedur kerja, mekanisme koordinasi, serta alur pertanggungjawaban ditata dalam suatu organisasi pemerintah sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara sistematis, efisien, dan konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data wawancara terhadap berbagai pemangku kepentingan di Desa Jajag, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Smart Kampung menunjukkan perkembangan yang cukup baik namun belum optimal pada seluruh tingkatan pelaksana. Dari sisi komunikasi kebijakan, pemerintah desa telah menggunakan berbagai saluran formal dan informal untuk menyampaikan informasi, seperti rapat desa, pengumuman, penyampaian melalui RT/RW, serta grup WhatsApp. Namun demikian, efektivitas komunikasi masih terhambat oleh perbedaan tingkat pemahaman antara perangkat desa, pelaksana dusun, dan masyarakat. Tujuan dan manfaat program relatif dapat dipahami, tetapi prosedur teknis masih dianggap rumit oleh sebagian warga, terutama yang memiliki tingkat literasi digital rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya konsisten, merata, dan belum mampu menghilangkan distorsi pada tingkat akar rumput. Selain itu, frekuensi sosialisasi yang terbatas dan kurang interaktif mengakibatkan masyarakat belum sepenuhnya mampu menginternalisasi pemahaman terkait alur layanan digital yang ditawarkan.

Pada 4 indikator meliputi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara tingkat desa dan tingkat dusun. Pada indikator sumber daya, ketersediaan perangkat teknologi, jaringan, dan SDM di

kantor desa relatif memadai, namun tidak terjadi pada tingkat dusun yang masih mengandalkan perangkat pribadi dan memiliki kompetensi teknis yang terbatas. Disposisi pelaksana di tingkat desa menunjukkan sikap positif, komitmen tinggi, serta rasa tanggung jawab yang cukup kuat, tetapi pelaksana di tingkat dusun belum sepenuhnya memiliki rasa kepemilikan program sehingga motivasi berjalan fluktuatif. Pada indikator struktur birokrasi, pembagian tugas dan SOP telah tersedia secara formal di tingkat desa, namun implementasinya belum dapat berjalan konsisten di tingkat dusun karena fasilitas minim, koordinasi tidak stabil, dan adanya tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, secara keseluruhan implementasi Program Smart Kampung di Desa Jajag sudah berada pada arah yang benar, namun masih membutuhkan penguatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas komunikasi, penyediaan sarana prasarana yang merata, serta perbaikan koordinasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan digital yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Komunikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi Program Smart Kampung belum berjalan optimal. Informasi mengenai program telah disampaikan oleh pemerintah desa, namun belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara berkelanjutan.

Sebagian masyarakat mengaku belum memahami secara jelas fungsi dan manfaat program. Mereka masih menganggap Smart Kampung sebagai sistem administrasi biasa. Hal ini menunjukkan bahwa transmisi informasi belum efektif. Menurut Edwards III, komunikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahan pemahaman dalam implementasi kebijakan (Nugroho, 2009).

Minimnya intensitas sosialisasi menjadi faktor utama rendahnya pemahaman masyarakat. Pemerintah desa

cenderung menggunakan metode konvensional dalam penyampaian informasi. Pendekatan ini dirasa belum efektif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Namun demikian, bagi masyarakat yang telah memahami program, mereka merasakan manfaat yang signifikan. Pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, komunikasi masih menjadi aspek yang perlu diperbaiki. Pemerintah desa perlu meningkatkan strategi sosialisasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.

Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya dalam implementasi Program Smart Kampung tergolong memadai. Pemerintah desa telah memiliki perangkat teknologi seperti komputer dan jaringan internet. Infrastruktur ini mendukung pelaksanaan pelayanan berbasis digital. Dari sisi sumber daya manusia, perangkat desa memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan sistem. Mereka juga menunjukkan kesiapan dalam menjalankan program. Hal ini sejalan dengan pendapat Edwards III bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya (Nugroho, 2009). Namun, masih terdapat keterbatasan dalam hal literasi digital masyarakat. Banyak warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Kondisi ini menjadi hambatan dalam optimalisasi program. Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi pengembangan program. Pemerintah desa belum mampu melakukan inovasi lebih lanjut dalam sistem pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya belum sepenuhnya optimal. Secara keseluruhan, sumber daya sudah mendukung implementasi program. Namun, perlu peningkatan pada aspek literasi digital masyarakat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Disposisi Pelaksana Kebijakan

Disposisi pelaksana menunjukkan hasil yang positif. Perangkat desa memiliki sikap yang mendukung terhadap Program Smart Kampung. Mereka menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelaksana memahami tujuan program sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mereka juga memiliki motivasi untuk memanfaatkan teknologi dalam pelayanan administrasi. Hal ini sesuai dengan teori Edwards III yang menekankan pentingnya sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan (Nugroho, 2009).

Pelayanan yang diberikan cenderung responsif dan membantu masyarakat. Perangkat desa tetap melayani masyarakat yang belum memahami sistem digital. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelayanan. Namun, terdapat tantangan dalam hal konsistensi pelayanan. Beberapa pelaksana masih bergantung pada metode manual. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap sistem digital belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, disposisi pelaksana sudah baik. Namun, perlu peningkatan dalam konsistensi penggunaan sistem digital agar program berjalan lebih optimal.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi Program Smart Kampung sudah jelas. Terdapat pembagian tugas yang terstruktur antara perangkat desa. Prosedur pelayanan juga telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Struktur yang jelas memudahkan koordinasi antar pelaksana. Hal ini mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan. Menurut Edwards III, struktur birokrasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan (Nugroho, 2009). Namun, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar unit. Beberapa proses pelayanan masih memerlukan waktu karena keterbatasan sistem. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam integrasi

sistem. Selain itu, prosedur pelayanan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat masih bergantung pada bantuan perangkat desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi belum sepenuhnya adaptif. Secara keseluruhan, struktur birokrasi sudah mendukung implementasi program. Namun, perlu peningkatan dalam integrasi sistem dan penyederhanaan prosedur pelayanan.

KESIMPULAN

Implementasi Program Smart Kampung di Desa Jajag Kabupaten Banyuwangi telah berjalan sesuai dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Program ini mampu meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan berbasis teknologi. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal. Permasalahan utama terletak pada aspek komunikasi yang belum merata. Rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan program. Sumber daya dan disposisi pelaksana menunjukkan kondisi yang baik. Struktur birokrasi juga telah mendukung pelaksanaan program. Meskipun demikian, masih diperlukan perbaikan dalam koordinasi dan integrasi sistem. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Program Smart Kampung sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, kesiapan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi. Pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi dan literasi digital masyarakat agar program dapat berjalan lebih optimal.

REFERENSI

- Ardiyasa, G. G., & Rahayu, E. (n.d.). Implementasi kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Moderat*, 8(4).
- Bimantoro, A., Pramesti, W. A., Bakti, S. W., Samudra, M. A., & Amrozi, Y. (2021). Paradoks etika pemanfaatan teknologi informasi di era 5.0. *Jurnal*

- Teknologi Informasi, 7(1), 58–68. <https://doi.org/10.52643/jti.v7i1.1425>.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *Handbook of qualitative research*. Sage.
- Hidayat, & Fitriani, I. (2020). Analisis pengaruh implementasi kebijakan daftar hadir elektronik dan pengendalian terhadap disiplin pegawai negeri sipil (Studi pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, 5–24.
- I Setiawan. (2022). Penerapan konsep Smart City dalam tata kelola pemerintahan Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 97–116.
- li, B. A. B. (2011). To establish a link that allows the goals of public to be realized as outcomes of governmental activity, 14–53.
- Lintang Pamungkas, N. (2020). Penyerahan agenda politik pemerintah: Pengelolaan kebijakan Smart Kampung berbasis society Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Transformative*, 6(1), 48–71. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.06.01.3>.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>.
- Menkominfo Rudiantara luncurkan “Smart Kampung” ala Banyuwangi. (n.d.). *Berita Banyuwangi*.
- Nurdin, A. (2011). Implementasi kebijakan pemerintah daerah No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 71–78. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1591>.
- Pemkab Banyuwangi. (2017). Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang penerapan masterplan smart city melalui Banyuwangi Smart Kampung (pp. 1–5).
- Purnamasari, I., Raswono, Y. M., Waeno, M., Samudera, A. A., & Suradika, A. (2025). Partisipasi masyarakat dalam penerapan smart village. *Jurnal Governansi*, 11(1), 83–90. <https://doi.org/10.30997/jgs.v11i1.18499>.
- Putri Mahardhika Alamat, A. (n.d.). *Curriculum vitae: I. Identitas diri*.
- Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi kebijakan publik (Konsep dan model)*. Tahta Media Group.
- Rifauddin, M. (2020). Pengelolaan arsip elektronik berbasis teknologi. *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 4(2), 168–178. <https://doi.org/10.24252/kah.v4i27>.
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>.
- Salsabila, H. N., Hartono, S., & Radjikan. (2024). Implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di Kota Sidoarjo Jawa Timur. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(5), 157–165. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i05.1640>.
- Suandi, S. (2019). Analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan indeks kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. *Journal PPS UNISTI*, 1(2), 13–22. <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i2.8>.
- Ummah, M. S. (2019). *Pelayanan publik. Sustainability*, 11(1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=y>.